

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam; perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Anthony dan Govindarajan, 2005). Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan prinsipal akan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Karena principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, principal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Oktaviandry (2008) menggambarkan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kepentingan pemilik, dalam hal ini terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, Jensen dan Meckling menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (bondholders). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan. Eisenhardt (1989) dalam Muh. Arief dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu :

1. Manusia pada umumnya memikirkan diri sendiri
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masalah mendatang
3. Manusia selalu menghindari resiko

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor atas dana yang mereka investasikan. Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang merugikan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Herawaty, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Corporate Governance

a. Definisi

Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2000) menyatakan bahwa Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai struktur yang oleh para pemegang saham, komisaris, dan manajer digunakan untuk menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007), elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme corporate governance adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Persentase saham yang dimiliki institusi
2. Persentase saham yang dimiliki manajemen
3. Keberadaan komite audit dalam perusahaan
4. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Ada empat unsur penting dalam corporate governance yang merupakan prinsip-prinsip dalam corporate governance, yaitu (FCGI) :

1. Fairness (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

2. Transparency (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

5. Independency (independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

Prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkan memberikan manfaat di antaranya yaitu :

- Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen
- Meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal
- Meningkatkan citra perusahaan



- d. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah, dan
- Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

c. Manfaat Corporate Governance

Penerapan *Corporate Governance* diharapkan memberikan manfaat (Tunggal,2008) antara lain :

(1) Meminimalkan biaya pengawasan

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul dari adanya pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi maupun biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal berikut. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini dapat ditekan seminimal mungkin.

(2) Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi pihak kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Disamping dapat memperkuat kinerja keuangan, kondisi tersebut juga akan membuat produk yang dihasilkan perusahaan menjadi kompetitif di pasar.

(3) Meningkatkan nilai saham perusahaan

Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Penelitian yang dilakukan Russel Reynold Associates (1997) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor



utama yang dinilai oleh investor sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan.

(4) Mengangkat citra perusahaan

Citra yang melekat pada suatu perusahaan adalah hal penting. Dalam beberapa kasus, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperbaiki citra lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan mengabaikannya.

d. Tujuan Corporate Governance

Sedangkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) menyatakan penerapan corporate governance bermanfaat sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku (faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.
- 4) Mengurangi kemampuan manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemegang saham, maupun *stakeholders* yang lain.
- 5) Mengurangi ekonomi berbiaya tinggi khususnya pada level korporat.
- 6) Mengembalikan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

e. Model Corporate Governance

Corporate Governance mempunyai 3 model (Tunggal,2002), yaitu :



1. *Principal Agent Model* atau dikenal dengan *Agency Theory*, yaitu korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik disatu pihak, dan manajer sebagai *agent* dilain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi *corporate governance* suatu perusahaan akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar.
2. *The Myopic Market Model*, masih memfokuskan perhatian pada kepentingan-kepentingan pemegang saham dan manajer, yaitu sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *corporate governance*. Oleh karena itu, *principal* dan *agent* lebih berorientasi pada keuntungan-keuntungan jangka pendek.
3. *Stakeholder Model*, yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korpoasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya : masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

f. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006:13).

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, karena Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

C (<http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/peranan.htm>).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa tugas-tugas utama dewan komisaris antara lain :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan dimana perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*)

Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen; serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

g. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung meneakn konflik keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

h. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance (transparency, accountability, responsibility, fairness)*. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“*the interest of the whole company*”. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI).

Komisaris independen yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Herawati, 2008).

i. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan investor institusional merupakan investor yang berpengalaman dan memiliki informasi yang memadai tentang perusahaan sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya asimetri informasi dapat dikurangi. Selain itu biasanya investor institusional lebih mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga manajer tidak akan mempunyai insentif untuk mengatur laba sekarang. Kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku *opportunis* manajemen yang memanfaatkan manajemen laba untuk kepentingan pribadinya, yang mungkin mengakibatkan kepentingan pihak lain terabaikan (Midiastuty, 2003). Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pihak lain (*stakeholder*). Dengan demikian kepemilikan institusional merupakan mekanisme *good corporate governance*, karena fungsi monitoring yang diberikan oleh investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder*.

3. Konservatisme Akuntansi

a. Definisi

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews* (Lara, et al., 2005). Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Menurut Belkaoui (2000: 187) konservatisme merupakan prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



batasan untuk penyajian data akuntansi yang relevan dan *reliable*. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih diantara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. Secara lebih spesifik, prinsip ini menunjukkan bahwa lebih disukai melaporkan nilai terendah untuk aset dan *revenue* dan nilai tertinggi untuk utang dan *expense*.

Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004).

Watts (2003) dalam Haniati dan Fitriany (2010) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang akan terjadi.

b. Manfaat Konservatisme

Kontroversi mengenai manfaat angka-angka akuntansi yang konservatif belum juga mendapatkan jalan tengahnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat. Tetapi ada juga pendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menentanginya dan beranggapan bahwa konservatisme akuntansi tidak bermanfaat

① Karena mengandung informasi yang bias.

1. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut. Para pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini menyebabkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak bisa dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi resiko perusahaan (Dewi,2003).

Pendapat Penman dan Zhang dan Basu (1997) dalam Dewi (2003) memperkirakan bahwa konservatisme akan menghasilkan kualitas laba yang rendah dan kurang relevan.

2. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Givoly dan Hayn (2000) dalam Dewi (2004) menunjukkan terjadi peningkatan konservatisme di Amerika Serikat.

Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (agency conflict).

Sekar dan Wilopo (2003) membuktikan bahwa konservatisme memiliki *value relevance*, sehingga laporan keuangan perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme dapat mencerminkan nilai pasar perusahaan. Semakin tinggi tingkat konservatisme yang diterapkan perusahaan maka semakin tinggi nilai pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditora dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly dan Hayn, 2002 dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002). Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*.

4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lara, *et al* (2005) dalam Wulandini (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah.

Dalam penelitian Wardhani (2008) yang menghubungkan karakteristik dewan dengan tingkat konservatisme, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi, sedangkan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian LaFond dan Roychowdhury (2007), menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme yang diukur dengan menggunakan ukuran *asymmetric timeliness* dari pengakuan laba dan rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ahmed dan Duellman (2007) dalam Wardhani (2008) menyatakan terdapat hubungan antara praktek akuntansi yang konservatis dengan karakteristik *board of directors*. Secara spesifik penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara persentase *inside directors* dalam dewan dengan konservatisme dan hubungan yang positif antara persentase kepemilikan perusahaan oleh *outside directors* dan konservatisme. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan adanya bukti yang konsisten terhadap pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu direksi untuk mengurangi biaya agensi dalam perusahaan.

Hasil penelitian Wu (2006) dalam Wardhani (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan mekanisme Corporate Governance (proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan komisaris) sebagai variabel independen dan konservatisme sebagai variabel dependen.

1. Proporsi Komisaris Independen dengan Konservatisme Akuntansi

Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



monitoringnya (Wardhani, 2008). Penelitian Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total jumlah komisaris maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar.

Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Dilain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2. Ukuran Dewan Komisaris dengan Konservatisme Akuntansi

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen penting dari karakteristik *Corporate Governance* yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara, *et al* (2005) dalam Wulandini (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



governance mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Komposisi anggota dewan komisaris yang tidak seimbang dengan dewan direksi akan menyebabkan komisaris mengalami kesulitan dalam berdiskusi dengan dewan direksi dan mengawasi kinerja perusahaan.

Menurut Egon Zehnder dikutip dalam Booklet FCGI, Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris mensyaratkan informasi yang berkualitas dalam menjalankan tugas pengawasannya. Oleh karena itu, dewan komisaris akan cenderung menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif. Penerapan prinsip konservatisme, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dipercaya oleh investor karena konservatisme dapat menghindari pelaporan keuangan yang berlebihan. Selain itu dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya *good corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut di atas maka diduga ukuran dewan komisaris akan mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan di dalam perusahaan. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Maka ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif. Oleh sebab itu, diperlukan jumlah anggota dewan komisaris yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



supaya proses monitoring lebih efektif. Sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kekuatan dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan sehingga penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

3. Kepemilikan Manajerial dengan Konservatisme Akuntansi

Jensen dan Meckling (dalam Wardhani, 2008) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan.

Wu (2006) juga meneliti dampak dari kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang salah satu ukurannya adalah konservatisme dalam pelaporan keuangan. Ia menghipotesiskan hubungan dua arah antara kedua variabel tersebut. Di satu sisi, manajer dengan kepemilikan ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Di sisi lain, akuntansi yang lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih sejalan dengan pemegang saham sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu untuk melindungi nilai investasi mereka. Selain itu, pemegang saham juga akan melihat adanya potensi dilakukannya manajemen laba dengan semakin besarnya kepemilikan manajerial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



tersebut sehingga menuntut tingkat konservatisme yang tinggi untuk menghindari oportunistik jangka pendek dari manajer. Hasil penelitian Wu (2006) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang lebih tinggi menunjukkan pola yang lebih konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bukti bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H3 : Kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

4. Kepemilikan Institusional dan Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 %) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004). Kepemilikan institusional dapat dilihat sebagai alternatif dari mekanisme *corporate governance*. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007) sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan secara tidak langsung dapat menuntut adanya informasi yang transparan dari pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional ini, maka semakin besar pula monitoring yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

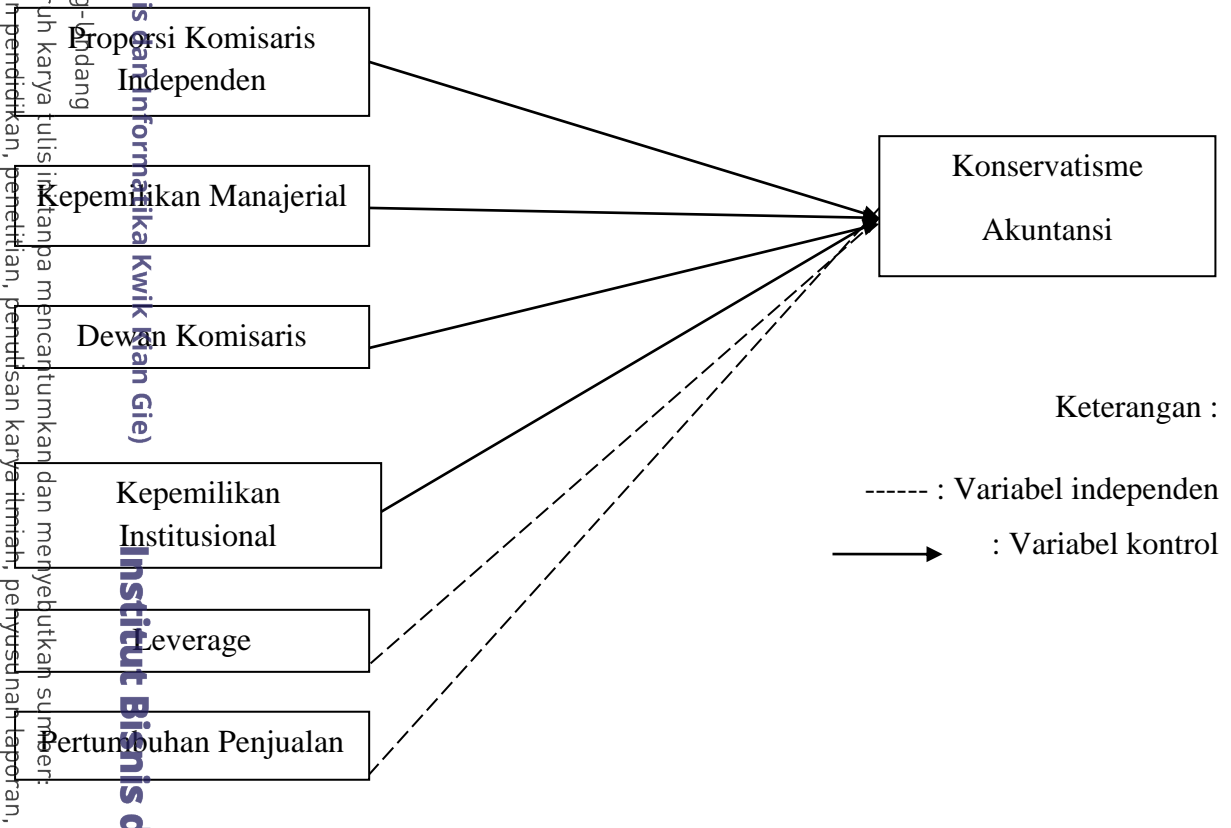


informasi yang transparan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka dapat mendorong pihak manajemen perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang konservatis.

H1 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Berikut adalah kerangka penelitian :

Gambar 2.1



Keterangan :

----- : Variabel independen

—————> : Variabel kontrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Proporsi Komisaris Independen

Kepemilikan Manajerial

Dewan Komisaris

Kepemilikan Institusional

Leverage

Pertumbuhan Penjualan

Konservatisme Akuntansi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.